

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ATAU KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini mengadaptasi dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk dapat memberikan ringkasan singkat dan penjelasan kerangka pemikiran penelitian. Selain itu, juga dapat sebagai sumber perbandingan dan sebagai bahan literatur untuk diskusi mendatang. Landasan pada penelitian ini disusun dengan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang penting dalam membentuk arah dan fokus pada penelitian ini. Adapaun berikut ini yaitu penelitian terdahulu sebagai yang digunakan sebagai landasan penelitian ini ialah:

1. Penelitian yang berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*” hasil dari pada penelitian tersebut adalah KPU yang terdapat pada setiap daerah mempunyai tugas untuk menaikkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada di tahun-tahun mendatang berikutnya, dilihat dari tiga jenjang yaitu, perumusan yang menampilkan adanya rencana sosialisasi dari KPU. Kedua tahapan pemilihan tindakan, KPU melakukan sosialisasi pada delapan segmen pemilih dengan strategi sosialisasi menggunakan tatap muka, dan pemanfaatan media massa dengan pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan wilayah yang akan dituju. Ketiga tahapan penentuan sumber daya dengan melaksanakan bimbingan secara teknis kepada panitia adhoc. Kendala pada program kegiatan yang dialami KPU adalah dengan minimnya anggaran, sikap apatis atau acuh dari masyarakat, dan jumlah personal KPU yang minim terbatas (Husen & Sosilowati, 2023).
2. Penelitian yang berjudul “*Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Sorong*” hasil daripada penelitian ini KPU Kota Sorong menggunakan pendekatan komunikasi yang bisa dikatakan belum membuat para masyarakat paham akan siapa yang mereka pilih dan

pentingnya menggunakan hak pilih, mereka masih banyak yang mengesampingkan pemilihan umum ini, karena dianggap kurang penting bagi mereka. Untuk itu KPU Kota Sorong menerapkan strategi agenda setting, yang mana memiliki 2 tingkatan yaitu, (1) agenda setting tingkat 1 adalah upaya membangun isu umum yang dinilai dan dianggap penting. (2) agenda setting tingkat 2 adalah dengan menentukan aspek-aspek dari isu umum tersebut yang dinilai penting. Sehingga dengan hal ini perlu adanya agenda media untuk dapat bersosialisasi melalui media yang akan berpengaruh terhadap agenda publik (Arce Yulita Ferdinandus, Susana Magdalena Muskita, 2024).

3. Pada penelitian yang berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*” hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa KPU Kota Bekasi melaksanakan sosialisasi secara masif, merata dan menysar beragam segmen di masyarakat. Strategi *ofensif* yang dilakukan KPU Kota Bekasi ini dalam hal sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar ini dilakukan dengan melalui program relawan demokrasi dengan target sasaran 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Pada tingkat bawah panitian pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutas suara (PPS) terdapat juga divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain hal itu, peran teknologi seperti media sosial juga memiliki andil dalam optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi. Strategi yang dilaksanakan untuk optimalisasi pemilih dilakukan dengan cara pemerataan sosialisasi. Terutama pada wilayah yang tingkat partisipasinya cenderung meningkat. KPU Kota Bekasi juga melakukan sosialisasi pada wilayah perbatasan yang Dimana wilayah tersebut dilakuakan sosialisasi karena trend pada pemilihan umum sebelumnya mencatatkan kecenderungan partisipasi rendah (Pulungan et al., 2020).

4. Penelitian berjudul “*Analisis Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Kota Solok*” hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi sosialisasi yang digunakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Solok. Hasilnya menunjukkan bahwa KPU memiliki beberapa tugas salah satunya adalah mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu. Dalam rangka mensosialisasikan pemilu ini dengan terus gencar melakukan promosi atau iklan di media sosial karena media sosial ini tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat maupun dari aktivitas sehari-hari. Lalu menggunakan pendekatan emosional sebagai strategi khususnya yang mana hal ini dapat memudahkan KPU untuk dapat mengajak masyarakat berpartisipasi dengan cara melakukan pendidikan pemilih, memberikan informasi sesuai aturan perundang-undangan dan memberikan hak yang setara kepada setiap individu atau pihak yang berpartisipasi dalam pemilihan umum (Bagus Hidayat, Ida Nirwana, 2023).
5. Pada penelitian yang berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*” hasil dari penelitian ini strategi KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilukada 2015 diukur dengan tiga tahap, tahap formulasi yang memperlihatkan kejelasan perencanaan sosialisasi dari KPU. Tahap pemilihan tindakan, dengan melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen dengan metode tatap muka, dan penggunaan media sosial yang disesuaikan dengan karakteristik segmen. Tahap alokasi sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia adhoc. Serta kendala yang dialami KPU dengan minimnya anggaran, sikap apatis masyarakat, dan jumlah pegawai KPU yang terbatas (Gleko et al., 2017).
6. Dalam penelitian yang berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan*

Umum” hasil dari penelitian ini adalah proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke sebagai lembaga yang berwenang melibatkan media dan tokoh masyarakat yang dianggap layak untuk memberikan atau menyampaikan sosialisasi materi terkait tata cara memilih kepada para pemilih pemula di kalangan pelajar dan mahasiswa se Kabupaten Merauke. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Merauke melaksanakan komunikasi politik dengan cara berkoordinasi dengan organisasi partai politik yang ada di Kabupaten Merauke. Koordinasi ini dilakukan berupa himbauan KPU Merauke agar partai politik dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme proses pemilihan umum. Lalu, Komisi Pemilihan Umum Merauke melakukan kegiatan penetapan daftar pemilih tetap, kegiatan ini menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke dalam urusan verifikasi data pemilih (Moento et al., 2019).

7. Pada penelitian yang berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024*” hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang ini dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi politik dan pemahaman masyarakat dengan partisipasi yang mencapai angka 88,40%, meningkat 9,17% dari Pemilu Tahun 2019 yang lalu. Strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2024 ini meliputi empat kategori, diantaranya strategi organisasi, program, sumber daya dan kelembagaan. Sedangkan, faktor lain yang mendukung meningkatnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tangerang ini adalah dengan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang politik, dan keterlibatan calon legislatif dan partai politik. Guna mengoptimalkan partisipasi politik pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Tangerang ini KPU Kabupaten Tangerang melakukan kirab pemilu yang menjadikan sarana

kampanye dengan melibatkan partai politik. KPU Kabupaten Tangerang juga mengajak tokoh agama untuk para pemilih untuk berpartisipasi (Safitri et al., 2024).

8. Dalam penelitian yang berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kabupaten Konawe 2024*” hasil dari penelitian ini KPU Kabupaten Konawe melakukan sosialisasi dengan menyasar para siswa rentang usia 17-21 tahun yang dalam kategori siswa yang baru lulus sekolah menengah atas dan mahasiswa, selain itu KPU juga menggunakan strategi secara tatap muka langsung yang ditujukan kepada organisasi profesi guru yang tergabung dalam PGRI, sosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, agama, dan perempuan. KPU Kabupaten Konawe juga memanfaatkan media sosial Facebook, Instagram dan Tiktok sebagai bahan menyampaikan informasi mengenai sosialisasi dengan harapan menarik perhatian pemilih pemula. Strategi KPU Kabupaten Konawe ini menggunakan tiga indikator yaitu, perumusan dan penetapan sasaran, tahap pelaksanaan yang telah melaksanakan sosialisasi yang menjangkau segmen masyarakat termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja muda (Pebrianingsi, Isma; Nurhayati, 2024).
9. Penelitian yang berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kabupaten Sumbawa*” hasil penelitian ini menunjukkan peran KPU Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pendidikan politik untuk pemilih pemula dengan melakukan program sosialisasi. Bentuk dari pendidikan politik KPU Kabupaten Sumbawa ini dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Selain itu, KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan sosialisasi politik dengan menggunakan media seperti, baliho atau spanduk, yang berisikan pesan ajakan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi pada pemilu dan juga berisikan perihal pemilu, pada media cetak ataupun media elektronik. Di samping itu, pada media elektronik dilaksanakan

dengan bentuk talkshow bincang-bincang yang disiarkan melalui radio guna membicarakan mengenai jenjang pemilu dan kiat-kiat menjadi pemilih bermutu dan cerdas. Lalu sosialisasi pemilu yang dilaksanakan melalui cara mengadakan pertemuan secara langsung atau bertatap muka yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula (Amrullah & Fikar, 2021).

10. Pada penelitian yang berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi kasus: Kecamatan Kuta Selatan)*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi KPU Kabupaten Badung memperlihatkan keberhasilan yang dibuktikan dengan tingginya partisipasi politik Kabupaten Badung dibanding Pemilu tahun 2019. Masyarakat Kecamatan Kuta Selatan mengetahui tentang pemilu tetapi, untuk masyarakat dari luar wilayah beberapa enggan mengurus perpindahan TPS. Akibatnya hal ini menjadi sebuah tantangan bagi KPU Kabupaten Badung agar masyarakat di luar wilayah dapat diberikan fasilitas untuk mengurus dokumen perpindahan TPS. KPU juga melakukan edukasi dengan sasaran sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai teknis pemilu (Gracella et al., 2024).

2.2. Kerangka Teori

1. Partisipasi Politik

Secara etimologi partisipasi ini berasal dari gabungan dua kata bahasa latin, yaitu *pars* mempunyai arti bagian serta *capere* berarti mengambil, sehingga secara harfiah partisipasi diartikan sebagai “mengambil bagian”. Lalu jika dalam Bahasa Inggris partisipasi dikenal dengan *participate* atau *participation* yang memiliki arti mengambil peranan, dalam arti partisipasi dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan mengambil peranan dalam suatu kegiatan atau aktivitas politik negara.

Menurut Miriam Budiardjo (2008) dalam (Alfred et al., 2018) partisipasi politik ini aktivitas seseorang atau sekumpulan

orang yang mengikuti secara giat kedalam kehidupan berpolitik, termasuk cara memilih pemimpin negara yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung. Ini termasuk dalam menghadiri rapat umum, berkolaborasi dengan politisi, anggota partai, atau anggota gerakan sosial dan memberikan suara dalam pemilihan umum.

Gabriel Almond berpendapat bahwa partisipasi politik terbagi 2 bentuk, yaitu secara kesepakatan dan tidak dengan kesepakatan. Jika dalam kesepakatan partisipasi politik seperti memberikan suara, mengikuti kegiatan diskusi politik, mengikuti aktivitas kampanye, membuat dan tergabung kedalam kelompok kepentingan, melaksanakan komunikasi bersama pejabat politik dan administrasi. Lalu bentuk tidak dengan kesepakatan merupakan usulan permohonan, demonstrasi, konfrontasi, tindakan kekerasan terhadap harta dan benda, menurutnya bentuk partisipasi politik dengan kesepakatan ini merupakan bentuk konvensional yang dianggap normal dalam demokrasi modern ini. Dan bentuk partisipasi politik tidak dengan kesepakatan termasuk pada yang legal dan beberapa masuk kedalam yang ilegal.

Pendapat lain menurut H. Nie dan Sidney Verba dalam Budiarto (1994:1) yang dikutip oleh (Abdullah, 2016) partisipasi politik diartikan aktivitas individu warga negara yang sesuai dengan aturan yang mana sedikit banyak untuk dapat memberikan pengaruh kepada seleksi para pejabat dan tindakan yang mereka ambil oleh mereka. Umumnya pemilu ini merupakan pelaksanaan politik yang menjadikan terbentuknya pemerintahan perwakilan menurut Robert A. Dahl (1992:33) yang adalah sebuah bayangan ideal bagi pemerintahan demokrasi di era kontemporer. Selain itu, pemilu legislatif sebuah rupa keikutsertaan rakyat dalam memilih wakil rakyat untuk mewakili aspirasi rakyat di dewan perwakilan. Dari pendapat ahli tersebut, di simpulkan partisipasi politik berkaitan dengan adanya keterlibatan seseorang atau kelompok orang dalam

kegiatan politik, yang berupa ikut andil dalam pemilu atau pengambilan kebijakan.

1. Faktor-faktor Mempengaruhi Partisipasi Politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1983) menerangkan partisipasi politik di Indonesia ini di lihat dengan dua cara yakni:

- 1) Partisipasi politik otonom, yang merupakan partisipasi karena kesadaran diri sendiri. Artinya masyarakat ikut serta kedalam partisipasi tidak dengan paksaan dari berbagai pihak melainkan, dengan dasar kemauan dan keinginannya untuk berpartisipasi.
- 2) Partisipasi politik disebabkan oleh adanya pengaruh dari berbagai pihak. Artinya masyarakat yang ikut dalam partisipasi bisa terjadi karena adanya ajakan atau perbuatan dari pihak luar sehingga masyarakat tersebut ikut serta kedalamnya.

Partisipasi otonom ini muncul akibat dipahami oleh persepsi perkara politik secara penuh. Kepahaman itu menjadikan penjelasan rinci kepada bukti perkara politik, yang mengakibatkan afeksi pada keputusan yang mengikuti pada perkara politik tertentu dengan rasa penuh dengan kesadaran tidak terdapat adanya desakan atau tekanan maupun desak kan dari pihak manapun.

Sebaliknya partisipasi politik yang dituntun keluar diakibatkan keadaan tekanan dari faktor diluar aktor politik dan secara umum menyampingkan alur membangun konsep dari persepsi pada kejadian perkara politik. Partisipasi seperti ini biasanya terjadi pada kurun waktu tertentu saja dan tidak selamanya bertahan, karena terdapat persaingan

dan segala sesuatu dapat bisa mempengaruhi keputusan seseorang pada objek politik eksklusif.

Seperti yang disampaikan oleh Ramlan Surbakti (2010:184) menguraikan mengenai sesuatu yang memiliki hubungan dengan besar atau kecilnya partisipasi politik pribadi adalah *problem* pada kesadaran politik. Yang meliputi capaian pemerintah, partai politik dan rasa kepercayaan publik. Kesadaran politik sendiri merupakan terdapatnya hak dan kewajiban menjadi rakyat dalam ruang sebuah negara. Hal ini berkaitan oleh pengetahuan seseorang bertempat tinggal di lingkungan masyarakat serta politik yang berhubungan dengan kemauan seseorang yang dimana mereka hidup, dasar agama ini juga terkadang dapat mempengaruhi. Faktor lain nya ialah penilaian seseorang terhadap situasi ekonomi dan kondisi sosial mereka, rekaman politik keturunan dan terdapat organisasi yang menjadi pedoman pondasi politiknya.

Keadaan sosial yang menjadi status seseorang di masyarakat dengan begitu faktor ini bisa dari derajat orang tua, tingkat pendidikan dan kedudukan pekerjaan. Keadaan ekonomi yang mengaitkan dengan lapisan masyarakat sesuai dengan total jumlah harta yang dimiliki. Kaitan dengan itu dapat dilihat melalui pendapatan, pengeluaran, kepunyaan harta benda dan lainnya. Seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dari segi ekonomi, atau sosial, bukan hanya memiliki pengetahuan tentang politik, tetapi melainkan memiliki kemauan dan minat khusus di bidang politik (Suprpto, 2021).

Faktor lain menurut Angell dalam Ross (1967:130) mengemukakan keadaan yang mempengaruhi partisipasi di masyarakat. Keadaan tersebut yang mempengaruhi keinginan seseorang ialah usia, jenis kelamin, latar

belakang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan serta, lamanya tinggal (Eviany, 2019). Dibawah ini penjelasan terkait faktor tersebut:

a) **Usia**, faktor ini dapat berpengaruh terhadap perbuatan seseorang ke dalam aktivitas di masyarakat. Mereka berasal dari golongan usia menengah sampai usia atas yang terikat dengan moral kepada nilai dan aturan masyarakat, yang merujuk dengan banyaknya berpartisipasi dibandingkan dengan kelompok usia yang lainnya. Dengan demikian usia ini sangat menyumbang pengaruh besar pribadi ke dalam aktivitas di masyarakat.

b) **Jenis Kelamin**, mengenai budaya berbagai macam bangsa menjelaskan mengenai dasarnya perempuan memiliki peran hanya “di dapur” artinya didalam lingkungan masyarakat peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga saja, meskipun demikian seiring dengan berjalannya waktu nilai tersebut semakin pudar dengan terdapatnya pergerakan persamaan hak wanita dan pendidikan bagi perempuan yang semakin bertambah lebih baik.

c) **Pendidikan**, sejatinya hal ini adalah sesuatu yang utuh untuk turut serta berpartisipasi. Pendidikan dimaknai dapat memengaruhi perilaku hidup seorang bagi keberlangsungan lingkungan disekitarnya, suatu perilaku yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan itu, pendidikan sejatinya memiliki

pengaruh yang penting untuk semua aspek yang bisa meningkatkan derajat hidup setiap pribadi.

d) Pekerjaan dan Penghasilan, tidak dapat dipisahkan satu dengan lain, pekerjaan yang baik dan sanggup memenuhi kehidupan dan kebutuhan dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat. Kondisi ekonomi yang mapan digunakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan.

e) Lamanya Tinggal, waktu yang dihabiskan seseorang untuk tinggal dan menetap di satu tempat, serta pengalamannya dengan lingkungan tersebut, dapat mempengaruhi tingkat partisipasi. Perasaan seseorang terhadap lingkungan itu semakin meningkat seiring dengan lamanya tinggal dan berpartisipasi di lingkungan tersebut.

2. Tipologi Partisipasi Politik

Terdapat 3 tipologi atau tipe partisipasi politik yang disampaikan oleh Rahman H.I (2007:288) diantaranya:

a) Partisipasi aktif, partisipasi ini melihat bagian dari rangkaian proses input dan output. Artinya partisipasi ini berkaca pada masukan yang telah disampaikan kepada masyarakat dan dapat di terima dengan baik serta, menghasilkan peran masyarakat dapat secara giat aktif terhadap partisipasi politik.

b) Partisipasi pasif, partisipasi ini berkiblat pada outup/luaran saja, dalam artian hanya patuh terhadap aturan pemerintah yang berlaku, menerima dan melaksanakan setiap

keputusan pemerintah yang sudah dijalankan. Artinya masyarakat cenderung ikut alur dan ikut tanpa adanya protes akan aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Hal ini dapat menjadikan masyarakat cenderung tidak aktif dalam partisipasi secara masif.

- c) **Golongan Putih (golput) atau Kelompok Apatis**, kelompok ini beranggapan sistem politik yang sedang berjalan atau yang ada menyeleweng dari yang direncanakan. Artinya masyarakat tidak peduli akan kondisi politik yang sedang terjadi yang menyebabkan masyarakat tidak secara aktif dalam partisipasi.

3. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Terdapat bentuk dari partisipasi, diantaranya sebagai berikut:

- a) **Partisipasi Vertikal**, partisipasi ini terbentuk dengan kondisi tertentu yang mana masyarakat turut serta atau ikut ambil bagian pada suatu program kegiatan pihak lainnya, dalam ikatan antara masyarakat yang berada sebagai bawahan, pengikut atau klien. Artinya masyarakat dengan secara aktif turut serta dalam kegiatan partisipasi yang secara bersama-sama.

- b) **Partisipasi Horizontal**, hal ini masyarakat memiliki upaya untuk berpartisipasi secara horizontal satu dengan yang lain. Masyarakat cenderung mengikuti alur yang berjalan tanpa berperan aktif dalam partisipasi.

Basrowi mengemukakan seperti dikutip oleh Siti Irene Astuti D. (2011:58), partisipasi masyarakat digolongkan menjadi dua, antara lain:

a) Partisipasi Fisik, merupakan rupa partisipasi dalam wujud menunaikan kegiatan yang mencurahkan tenaga dan pikiran kepada pendidikan, seperti pendirian atau mengurus usaha sekolah. Masyarakat dengan secara giat melakukan kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada sesama hal ini merupakan wujud daripada gotong royong yang dilakukan untuk dapat memberikan manfaat bagi sesama.

b) Partisipasi Non Fisik, tindakan masyarakat untuk memastikan maksud tujuan dan pendidikan serta, merata ke semua penjurur keinginan masyarakat untuk menimba ilmu pengetahuan dengan mengakses pendidikan sehingga pemerintah tidak mengalami kesulitan. Artinya masyarakat mengikuti partisipasi dengan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang akan dibuat yang nantinya akan dapat dirasakan oleh masyarakat serta, demi memenuhi keinginan dan capaian masyarakat yang ingin diwujudkan.

Aktivitas politik dengan kesepakatan adalah partisipasi yang tergolong normal dalam demokrasi modern (Anggara, 2013). Bentuk tidak dengan kesepakatan, biasanya seperti surat permohonan, tindakan secara paksaan, dan menghendaki perubahan secara menyeluruh. Bentuk-bentuk dan siklus partisipasi politik dapat dijadikan untuk mengukur melihat keseimbangan sistem

politik, kesatuan yang utuh dalam kehidupan politik, dan kepuasan atau tidak puas nya masyarakat.

Menurut Milbrath dan Goel, aktivitas partisipasi digolongkan menjadi empat golongan yaitu:

- a) **Kelompok apatis**, seorang yang ikut serta berpartisipasi dan keluar dari proses politik yang sedang terjadi atau berjalan. Artinya kelompok ini mereka tidak turut dalam aktivitas atau kegiatan politik dalam bentuk apapun dan tidak peduli dengan sistem politik yang sedang berlangsung.
- b) **Spektator**, seorang yang tidak pernah terlibat dalam pemilihan umum. Artinya orang tersebut tidak pernah menggunakan hak pilih suara selama pemilihan umum berlangsung dan bisa di katakan sebagai golongan putih atau tidak ikut serta menggunakan hak sebagai pemilih untuk memilih calon pemimpin.
- c) **Gladiator**, komunikator yang mempunyai keahlian yang dapat menimbulkan kontak secara tatap muka, aktivis gerakan partai, pekerja kampanye dan aktivis gerakan masyarakat. Artinya orang yang paling aktif dan paling depan dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum atau pemimpin dari sekelompok gerakan yang bisa berupa dari gerakan masyarakat atau partai politik.
- d) **Pengkritik**, bentuk partisipasi yang tidak konvensional. Artinya orang yang tidak terhubung dari kelompok manapun yang selalu memberikan kritikan nya terhadap suatu pemerintahan atau kepada penguasa

untuk dapat menarik simpati atau respon masyarakat.

2. Strategi

Kata strategi ini diambil dari bahasa Yunani yang artinya “*Strategos*” atau stratos yang berarti militer atau memimpin yang memiliki makna “*Generalship*” atau sesuatu hal yang dilakukan para jenderal perang untuk membuat rencana, taktik dalam memenangkan peperangan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi ini sebuah perencanaan yang berkenaan dengan aktivitas dalam mencapai sasaran secara khusus. Selain itu, definisi strategi menurut Supriyono yang dikutip oleh (Jayanti, 2022) strategi ini adalah satu kesatuan rencana dari perusahaan atau organisasi yang komperhensif dan terpadu yang sangat diperlukan.

Strategi merupakan perencanaan berjangka panjang yang disertai perbuatan yang dimaksudkan untuk menggapai arah tujuan tertentu yang pada umumnya adalah untuk menggapai keberhasilan atau keunggulan. Definisi strategi ini dikemukakan oleh Chandler yang menjelaskan strategi adalah penempatan dari arah tujuan dan sasaran berjangka panjang dalam sebuah organisasi dan menggunakan serangkaian perbuatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut (Salusu, 2015). Scroder juga menjelaskan strategi politik ini terdapat dua macam yaitu strategi *ofensif* (menyerang) dan strategi *defensif* (bertahan). Lalu Newman dan Seth menyebutkan ada empat macam strategi yaitu penguatan, rasionalisasi, bujukan dan konfrontasi (Ardiani et al., 2019).

Pendapat lain mengenai strategi ini di kemukakan oleh Ahmad S. Adnan Putra yang dikutip oleh (RAF, 2023) strategi ialah sepenggal dari sesuatu rencana, dengan ini rencana merupakan hasil dari perencanaan yang telah dibuat pada akhirnya dijadikan sebagai kegunaan dasar pedoman dari manajemen. Maka dari itu strategi pada prinsipnya merupakan suatu perencanaan dan manajemen

untuk dapat menggapai suatu tujuan yang sudah ditentukan dalam praktik operasionalnya.

Pengertian lain dari strategi ini dikemukakan oleh Tjiptono (2012) yang mengemukakan strategi ini gabungan cara yang menyatu dengan pelaksanaan ide gagasan hasil pemikiran, atau sebuah rencana dalam waktu yang telah direncanakan. Strategi ini mempunyai peran penting untuk menggapai sebuah tujuan khusus, dan keberhasilan suatu usaha bergantung pada kecakapan pemimpin dalam hal merencanakan strategi yang tepat (Arsya & Adawiyah, 2023).

3. Pemilihan Umum

Pemilu merupakan kompetisi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini menjadikan prasyarat demokrasi, peserta pemilu yang terpilih dan mengisi kekuasaan merupakan sebuah kehendak dari rakyat sebagai pemilih. Pemilu juga sebagai wujud nyata demokrasi yang prosedural, namun pemilu juga merupakan aspek demokrasi yang penting untuk di selenggarakan secara demokratis. Umumnya di negara-negara yang menyebutkan dirinya negara yang demokrasi menjadikan tradisi pemilu sebagai rangkaian memilih pemimpin negara atau perwakilan di pemilihan legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat atau tingkat daerah. Pemilu memperlihatkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat atau di tangan rakyat dan dipercayakan untuk kepentingan rakyat, dan kepada rakyat para pejabat publik bertanggungjawab penuh atas tindakannya (Prasetyoningsih, 2014).

Pemilu di Indonesia sendiri seiring berjalannya waktu mengalami perubahan, pemilu ini dilangsungkan selama 5 tahun sekali untuk dapat bisa melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada zaman modern seperti ini posisi pemilu menjadi hal yang sangat penting dilaksanakan karena pertama, pemilu ini merupakan mekanisme cocok ditemukan untuk rakyat

agar masyarakat tetap memiliki kuasa atas kedaulatan dirinya. Dengan berkembangnya masyarakat dan jumlah masyarakat yang bertambah banyak dengan persebaran yang semakin meluas menjadikan berbagai macam terjadinya kerumitan persoalan yang terjadi dan dialami oleh rakyat semakin bermacam-macam. Kedua, pemilu ini menjadi syarat sebuah negara demokrasi bahkan tidak terdapat negara satupun yang menganggap negaranya demokratis dengan tanpa melaksanakan pemilu, walaupun negara tersebut tergolong otoriter. Ketiga, pemilu menjadi penting untuk dibahas karena kaitannya dengan keadaan yang luas dari pemilu, serta menjadikan pemilu ini sebagai cara untuk memperlemah rezim yang otoriter (Defretes & Kleden, 2023).

4. Sosialisasi Politik

Menurut M. Rush dan P. Althoff (2008) dalam (Wahyudi & Adnan, 2019) sosialisasi politik semacam langkah memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan orang tersebut dapat memutuskan tanggapan dan respon terhadap gejala politik. Pendapat lain sosialisasi politik menurut Andriyani (2017) dalam (Warno, 2023) mengatakan sosialisasi politik ini merupakan pembelajaran pengalaman yang secara umum berfokus pada hasil belajar perilaku seseorang dan kelompok, baik secara umum atau secara khusus dalam hal pengetahuan atau informasi, nilai dan sikap. Sosialisasi ini tidak hanya terbatas oleh usia tetapi, sosialisasi politik ini dapat dilakukan di berbagai tempat misalnya pada, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, di suatu negara atau di dalam partai politik.

Adapun tujuan sosialisasi politik ini untuk dapat memahami dan memperluas pengetahuan, kesadaran terhadap isu politik yang sedang terjadi. Melalui proses sosialisasi politik ini harapannya dapat memainkan peran dalam politik. Dan juga dapat mengetahui serta memahami norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat. Sebagai proses dari sosialisasi politik ini individu dapat menangani isu yang berkembang dalam mempengaruhi kepentingan pribadi dan

kepentingan orang lain, sehingga dapat mendapatkan pemahaman yang komperhensif tentang gejala politik dan isu-isu politik yang sedang muncul di tengah masyarakat. Dengan ini dapat menimbulkan kesadaran politik masyarakat dan dapat mengambil peran aktif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan politik negara.

a. Tahapan Sosialisasi Politik

Menurut Robert H. Blank sosialisasi politik terdapat tiga tahapan yaitu:

- 1) Tahap anak-anak, tahap ini merupakan hal yang paling awal, sosialisasi politik menenaknkan untuk membentuk loyalitas politik, yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan pada anak, antara lain adalah keluarga dan lingkungan pendidikan. Yang dilakukan dengan cara pengenalan lagu kebangsaan atau bendera nasional negara yang diajarkan sejak usia dini.
- 2) Tahap remaja, pada hal ini memasuki tahap remaja yang bertransisi untuk memasuki usia dewasa yang relatif intens untuk membangun hubungan dengan berbagai kelompok pergaulan. Pada tahap remaja ini sosialisasi politik menenkankan pada pengembangan emosional, untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman lembaga politik dan apa yang dirasakan tentang adanya lembaga tersebut. Kelompok sebagai pihak yang mensosialisasikan politik, memiliki kedudukan setara dengan sasaran sosialisasi.
- 3) Tahap dewasa, pada tahap akhir ini seseorang yang telah dewasa yang mana proses

sosialisasi ditandai dengan adanya pengaruh dari kebijakan dan kondisi tertentu pada seseorang yang menjadi target sosialisasi. Selain itu masih terdapat peran dari kelompok dalam proses ini, pengalaman politik yang dimiliki individu dapat memberikan pengaruh pada kelompok pergaulan.

b. Dua perspektif Sosialisasi Politik

Paul Alan Beck memaparkan terdapat dua perspektif sosialisasi politik diantaranya:

- 1) *Teaching Perspective*, hal ini merujuk pada proses individu yang diberikan sosialisasi, sikapnya cenderung pasif karena disebabkan hanya diajarkan atau menerima materi sosialisasi tanpa adanya menunjukkan respon kembali. Hal ini dapat dilihat sosialisasi politik yang diberikan berjalan dengan satu arah. Masyarakat hanya menerima materi tanpa menunjukkan sikap kritis.
- 2) *Learning Perspective*, dalam hal ini masyarakat cenderung memiliki sikap yang aktif karena mempunyai peluang untuk dapat membuka diri selama proses sosialisasi yang sedang berlangsung. Hal ini seseorang tidak hanya bersikap pasif dalam menerima materi sosialisasi tetapi, juga memberikan kesempatan untuk menolak dan mengkritisi materi sosialisasi yang diberikan atau diterima oleh masyarakat.

c. Elemen Sosialisasi Politik

Menurut Langton terdapat beberapa elemen yang penting dalam sosialisasi politik antara lain

adalah Pertama, proses sosialisasi politik diperlukan agen atau aktor sebagai orang yang secara aktif memberikan sosialisasi. Kedua, adanya materi atau isi yang tidak selalu tentang politik tetapi, bisa dengan hal yang lain, asal mampu untuk dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadap politik. Ketiga, harus terdapat adanya interaksi antara aktor yang memberikan materi sosialisasi dengan target yang diberikan sosialisasi. Dalam hal ini, interaksi bisa berupa menentukan proses penerimaan dan penolakan materi sosialisasi politik.

5. Pendidikan Politik

Menurut Handayono dan Lestari (2017) dalam (Fauziyah, 2024) pendidikan politik ini sebagai upaya untuk mengarahkan seseorang yang berkepribadian politik, untuk mempunyai kesadaran mengenai politik dan sanggup melakukan peran dengan rasa tanggung jawab secara moral menuju tujuan politik di masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan politik juga dapat dibidang sebagai pendidikan intensional dan sistematis untuk dapat memberikan pengaruh kepada seseorang, agar turut berperan aktif dalam usaha perjuangan politik, dan memiliki rasa akan tanggung jawab yang tinggi dalam aktivitas politik. Pendidikan politik menjadi sesuatu yang tentu penting untuk disampaikan kepada khususnya anak-anak muda yang tidak memperoleh pemahaman mengenai politik, jika tingginya pendidikan pada masyarakat maka hal itu akan tinggi pula kesadaran politik di masyarakat. Hal ini juga dapat membuat demokrasi menjadi berkualitas di negara ini dikarenakan dapat memberikan pemahaman mengenai kejadian politik sehingga dapat memunculkan kesadaran politik dan partisipasi politik.

Pendidikan politik juga tidak dapat terpisah dari pendidikan kewarganegaraan. Yang mana telah diamanatkan melalui Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik yang memiliki peran melaksanakan pendidikan politik yang terpusat pada pendidik partai dan masyarakat dengan menekankan pada hak dan kewajiban warga negara masyarakat dalam memperbaiki moral dan kultur politik kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, pendidikan politik ini dilakukan oleh partai politik rentan terhadap *conflict of interest* yang disebabkan dengan kepentingan partai politik itu sendiri. Dengan begitu partai politik seharusnya dapat mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu dibanding kepentingan dalam partai agar, tujuan dari partai dapat tercapai dan citra partai politik di mata publik dapat terkendali dengan baik serta, menghindari adanya konflik internal yang menyebabkan partai menjadi terpecah belah dan tujuan yang ingin di capai tidak dapat di jalankan dengan baik.

